

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah proyek strategis yang dijalankan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Obyek wisata alam menjadi yang terbanyak dibandingkan jenis obyek wisata lain (alam, buatan, budaya, dan minat khusus) yaitu sebesar 53,71%, pengembangan pariwisata di Jawa Barat mengedepankan pariwisata berbasis masyarakat (Jabarprov, 2023). Salah satu wilayah yang memiliki jumlah obyek wisata alam terbanyak di Jawa Barat adalah Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi memiliki sejumlah objek wisata yang sudah dikenal sejak lama antara lain, Pantai Ujung Genteng, Situ Gunung, dan *Geopark* Ciletuh. Situ Gunung menjadi lebih dikenal setelah pembangunan jembatan gantung atau *suspension bridge* kedua pada tahun 2019 diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. Jembatan tersebut merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 243 meter dan berada di ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah.

Saat ini pengelolaan pariwisata di Situ Gunung dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dalam hal ini Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan PT. Fontis Aquam Vivam. Pembangunan *suspension bridge* atau jembatan gantung tersebut merupakan bagian dari pengembangan *resort* taman nasional. Jembatan gantung, Curug Sawer, dan Curug Kembar kemudian menjadi ikon pariwisata Situ Gunung dan dikunjungi lebih dari 1.000 orang wisatawan per hari. Pada puncak kepopulerannya, pengunjung Situ Gunung mencapai 16 ribu dalam satu bulan, yaitu pada tahun 2023.

Pada libur natal 2023 dan tahun baru 2024, yaitu tanggal 22 Desember 2023 hingga 01 Januari 2024, tercatat pengunjung Situ Gunung mencapai 10 ribu pengunjung (Tribunnews.com, 2024). Diperkirakan rata – rata pengunjung di akhir pekan dan di hari libur tahun 2024 mencapai 3.000 orang. Namun, kepopuleran obyek wisata tersebut sejak awal dinilai tidak secara langsung berdampak pada perekonomian 7.091 jiwa masyarakat di Desa Gedepangrango. Manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata di Situ Gunung dinilai tidak merata dan hanya dirasakan oleh segelintir orang. Sedangkan dampak lingkungan berupa kemacetan, sampah, dan polusi air dirasakan oleh seluruh masyarakat di Desa Gedepangrango.

Desa Gedepangrango memiliki empat dusun, yaitu Dusun Cibunar I, Dusun Cibunar II, Dusun Cijagung I, Dusun Cijagung II. Pengembangan pariwisata di Desa Gedepangrango masih terbatas di Danau Situ Gunung, *suspension bridge*, dan Curug Sawyer yang terdapat di salah satu dusun tersebut, yaitu Dusun Cijagung. Sementara itu masih banyak potensi alam dan budaya di dusun lainnya yang belum dikembangkan. Beberapa potensi alam dan budaya tersebut yaitu; produksi gula aren, wisata petik buah, *trekking* sepeda, seni musik tradisional Kaledor, sawah, sungai dan beberapa air terjun kecil.

Melihat potensi alam dan budaya di dusun sekitar Situ Gunung, salah satu penggerak wisata yakni Bapak Ending dan Bapak Deni yang juga pengelola bumi perkemahan Tanakita di Desa Gedepangrango dan pegawai tetap PT Fontis berinisiatif mengajak pengunjung Tanakita untuk mencoba melihat proses produksi gula aren. Pengunjung dapat melihat produksi gula aren secara tradisional mulai dari saat gula aren diambil dari pohon aren, dimasak dalam kuahi besar, hingga dicetak menggunakan bambu.

Kemudian aktivitas tersebut dikembangkan dengan membuat rute *trekking* yang memanfaatkan potensi alam dan budaya yaitu air terjun, sungai, persawahan, perkebunan. Paket - paket wisata

sebetulnya sudah dibentuk sejak tahun 2017, ketika *suspension bridge* mulai menjadi destinasi wisata yang populer bagi warga Jabodetabek. Paket wisata yang dikembangkan awalnya hanya wisata pembuatan gula merah tradisional di Kampung Lahang, wisata petik buah di Kampung Sawo, serta wisata susur sungai sudah dijalankan oleh beberapa kelompok di dua dusun tersebut sejak tahun 2017.

Namun, pengelolaan pariwisata yang dilakukan saat itu belum terintegrasi satu dengan yang lain sehingga belum dikenal wisatawan yang mengunjungi Situ Gunung, hanya segelintir pengunjung Tanakita dan warga lokal yang menjadi pengunjung. Oleh karena itu Bapak Ending dan beberapa pemuda di Dusun Cijagung bersama perangkat desa berinisiatif membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada dan mengintegrasikan paket wisata yang sudah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pembentukan Pokdarwis juga bertujuan untuk membangun Desa Wisata Gedepangrango sebagai alternatif dari wisata di Situ Gunung. Pada tahun 2020 Desa Gedepangrango ditetapkan sebagai desa wisata rintisan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kemenparekraf. Implementasi program yang dilakukan pada oleh

Pokdarwis Desa Wisata Gedepangrango sebagai desa rintisan untuk mengembangkan pariwisata pada tahun 2023 berpedoman kepada Pedoman Desa Wisata, terbagi dalam 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas). Implementasi program pengembangan Atraksi sebagai desa wisata rintisan, yaitu, mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi dan karakteristik desa dari semua aspek; mensosialisasikan potensi kepada seluruh masyarakat; menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata; merintis pengembangan fasilitas dan sarana prasarana. Sementara implementasi program Aksesibilitas dan Amenitas adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik. Pokdarwis Desa Gedepangrango mengembangkan paket wisata dan produk kreatif yang mendukung aktivitas wisata seperti gula semut yang berasal dari gula aren, hiasan dan pernak – pernik dari bambu yang dibuat sebagai oleh – oleh saat pengunjung datang ke dusun – dusun di Desa Gedepangrango.

Pembangunan desa wisata merupakan pembangunan yang menitikberatkan distribusi pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah. Desa - desa di Indonesia memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan

berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep membangun dari pinggiran atau dari desa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menggali potensi lokal dan pemberdayaan masyarakatnya yang dicanangkan oleh Pemerintah sebagai program prioritas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah tingkat desa memiliki otonomi sendiri untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunannya.

Kearifan lokal adalah roh utama dalam pengelolaan desa wisata. Nilai kearifan lokal terwujud dalam masyarakat melalui nilai keunikan budaya maupun tradisi yang dimiliki oleh masyarakat, nilai keotentikan yang sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat setempat, serta keaslian nilai-nilai tradisi yang muncul di masyarakat. Nilai-nilai ini yang akan menarik wisatawan mengunjungi Desa Wisata. Salah satu model pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat dengan Community Based Tourism (CBT) adalah pengembangan desa wisata.

Desa Wisata bisa saja terdiri dari lebih dari satu desa yang berdekatan sehingga menciptakan sebuah wisata berbasis pedesaan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata menitikberatkan pada perasaan dan sense yang ditimbulkan saat seseorang berwisata di Desa Wisata, dan tidak terikat pada suatu wilayah administratif tertentu.

Dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wisata:

- a. Keaslian : atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut;
- b. Masyarakat setempat: merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat;
- c. Keterlibatan masyarakat : masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
- d. Sikap dan nilai: tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada; dan
- e. Konservasi dan daya dukung: tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya

dukung desa dalam menampung wisatawan.

Sebagai desa wisata rintisan, Desa Wisata Gedepangrango masih memerlukan identifikasi dan pemanfaatan sumber daya, baik alam, budaya, dan manusia, untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada, baik sumber daya fisik maupun non fisik. Namun, implementasi program pengembangan desa wisata rintisan dalam pedoman tersebut hanya berfokus kepada pembangunan sarana dan prasarana, tidak mempertimbangkan berbagai sumber daya non fisik yang dimiliki Desa Gedepangrango, salah satunya modal sosial. Modal sosial merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan oleh Desa Gedepangrango untuk mewujudkan pembangunan pariwisata inklusif dan berkelanjutan sesuai tujuan.

Meskipun tidak ada satu kesepakatan mengenai definisi modal sosial, konsep ini secara umum diartikan sebagai nilai jejaring sosial, mengikat orang-orang yang memiliki kesamaan dan menjembatani orang-orang yang berbeda, dengan norma timbal balik/ resiprositas (Dekker dan Uslaner, 2011; Uslaner, 2011). Modal sosial memungkinkan suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Konsep modal sosial yang diperkenalkan Bourdieu (1986), Coleman (1988), dan Putnam (1993) memiliki kesamaan yaitu modal sosial memiliki fitur atau elemen yaitu



interaksi sosial, rasa percaya, aksi bersama (*collective action*), kooperasi (*cooperation*), jejaring (*network*), hubungan (*relationship*), norma dan nilai bersama.

Konsep CBT berkaitan erat dengan modal sosial, khususnya pengelolaan modal sosial untuk mengembangkan pariwisata yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan berkelanjutan serta memperhatikan dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Desa Wisata merupakan model pengembangan pariwisata berbasis komunitas masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) yang banyak diadaptasi oleh negara berkembang bertujuan untuk memungkinkan pemangku kepentingan pariwisata lokal mengelola dan memiliki kegiatan mereka sendiri, dan semua manfaat diberikan dan terfokus pada mereka (Goodwin & Santilli, 2009). Inisiatif pariwisata berbasis komunitas diyakini memberikan mekanisme untuk mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata secara lebih luas dibandingkan bentuk pengembangan pariwisata lainnya sekaligus mendukung perlindungan sumber daya lokal dan alam (Mitchell & Coles, 2009; Montero et al., 2021; Lee & Jan 2019). Namun pengembangan CBT sering kali mengesampingkan aspek modal sosial.

Beberapa penelitian terkait pariwisata dan modal sosial yang telah dilakukan (Lee et. al., 2013; Rastrollo-Horrillo & Diaz, 2019; Moscardo et. al., 2017) tidak mengaitkan perubahan modal sosial; rasa percaya (*trust*), interaksi sosial (*social interaction*), dan jejaring (*network*), yang terjadi karena pariwisata berbasis komunitas. Rasa percaya yang dimiliki masing – masing anggota komunitas, interaksi sosial yang terjadi akibat pembangunan pariwisata berbasis komunitas, dan jejaring yang terbentuk, dapat menjadi faktor dalam meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan bersama yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama (*shared goals*). Seluruh modal sosial tersebut mempengaruhi tata kelola desa wisata, antara lain mempengaruhi komunikasi dan aliran informasi baik di dalam organisasi Pokdarwis maupun kepada masyarakat, mempengaruhi bagaimana keputusan diambil dan diterapkan oleh seluruh pihak atas dasar rasa percaya, dan mempengaruhi perluasan jejaring Desa Wisata Gedepangrango yang berkembang melalui interaksi sosial.

Selain modal sosial, sebagai pariwisata alternatif yang sedang dikembangkan, Pokdarwis Desa Wisata Gedepangrango juga perlu mempertimbangkan dan menganalisis pengaruh Situ Gunung sebagai pariwisata arus utama yang telah berdiri dan mapan

terhadap pembangunan pariwisata Desa Gedepangrango. Konsep CBT yang dianggap sebagai alternatif terhadap pariwisata arus utama dinilai menggantikan dan tidak dapat berdampingan dengan pariwisata massal. Oleh karena itu, maka judul penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Modal Sosial Berpengaruh Terhadap Desa Wisata Rintisan?”.

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana modal sosial yang dimiliki desa wisata rintisan berpengaruh terhadap tata kelola desa wisata?
2. Bagaimana keberadaan pariwisata massal/ pariwisata arus utama berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata alternatif di sekitarnya yaitu Desa Wisata Gedepangrango?
3. Bagaimana perubahan modal sosial dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui tata kelola desa wisata?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana modal sosial dapat dimaksimalkan dalam mengembangkan desa wisata rintisan!
2. Untuk mengetahui pengaruh pariwisata arus utama yang sudah ada dan mapan terhadap perkembangan pariwisata alternatif yaitu desa wisata!

3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan modal sosial akibat pariwisata berbasis komunitas terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pariwisata melalui tata kelola!

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat bagi Industri Pariwisata

Bagi industri pariwisata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemanfaatan modal sosial untuk membangun dan mengembangkan desa wisata rintisan.

2. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada sebuah teori baru terkait model pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang mempertimbangkan aspek modal sosial.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat terbantu dalam menyusun dan menerapkan kebijakan pembangunan pariwisata yang tepat berbasis masyarakat.